



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRAPTANUGRAHA
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 216189

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **320.000.000**

1. Bangunan Seluas 105 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
3. Tanah Seluas 927 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 91 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **163.100.000**

1. LAINNYA, ---(SEPEDA) SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
2. LAINNYA, SEPEDA MERK THRILL XC 3 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. LAINNYA, SEPEDA POLIGON MONARCH 3 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA EXTRADA 5 SEPEDA POLIGON Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000



8. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.950.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	68.393.985
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	565.443.985

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	565.443.985

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.